



RENCANA KERJA DAN TARGET PRIORITAS  
TAHUN 2024

NO	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)/ KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	OUT COME	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DARI RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG/ BUKTI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>								
1	Pembangunan Zona Integritas di Unt Kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021)	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya satuan kerja berpredikat WBK?WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 30% dari seluruh satuan kerja	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	Jumlah laporan pencanangan/ komitmen bersama zona integritas (ZI)	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	<b>B03 :</b> 1. Dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan pencanangan zona integritas yaitu : a. Kegiatan Eksternal pencanangan zona integritas melampirkan foto, laporan kegiatan dan press release b. Kegiatan internal: - Dokumen Perjanjian Kinerja - Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas antara Kepala kesatuan kerja dengan jajaran struktural dibawahnya - Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas antara jajaran struktural dalam satuan kerja dengan pegawai <b>B03, B06, B09, B12 :</b> 1. Dokumen kegiatan sosialisasi kepala satuan kerja / internalisasi/ pendampingan terkait pembangunan ZI menuju WBK/WBBM a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi foto d. Laporan Kegiatan 2. Sosialisasi kepada masyarakat: a. Capture banner/spanduk/himbauan/brosur b. Capture Website c. Capture Media Sosial d. Capture Media Elektronik e. Capture Media Cetak f. Capture Media Tv g. Laporan Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat
				Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	Jumlah laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan Recna Aksi dan Target Prioritas	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	<b>B03, B06, B09, B12 :</b> Dokumen kegiatan rapat pelaksanaan rencana aksi dan target prioritas oleh tim kerja a. Undangan rapat b. Daftar Hadir c. Notula dan Dokumentasi foto d. Laporan kegiatan pembangunan ZI berdasarkan rencana aksi dan target prioritas
			Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan pelatihan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	<b>B03:</b> 1. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan budaya kerja atau Tata Nilai PASTI dan berAKHLAK 2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya <b>B03, B06, B09, B12 :</b> Dokumentasi pegawai yang menerima reward dan punishment	

PENATAAN TATALAKSANA								
NO	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)/KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	OUT COME	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DARI RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG/BUKTI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terbangun Pelayanan Publik Digital (Digital Services)	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Terwujudnya kepatuhan standar pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	B03 : SK Kepala Satuan Kerja tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
				rekan memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	B03, B06, B09, B12 : Laporan Pelaksanaan kegiatan tim PPID dalam hal penyebaran/luasannya informasi: a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi Foto d. Laporan hasil pelaksanaan keterbukaan informasi publik B03, B06, B09, B12 : 1. Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik oleh TIM PPID 2. Laporan Tindak Lanjut monitoring dan evaluasi
SISTEM MANAJEMEN SDM								
NO	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)/KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	OUT COME	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DARI RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG/BUKTI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Penataan Jabatan Fungsional 2. Penguatan Manajemen Talenta ASN 3. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN 4. Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	Terimplementasinya sistem merit di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	Jumlah dokumen Penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	B03	Ka. UPT	1. Dokumen SKP (berdasarkan ketentuan terbaru) 10 orang pegawai dan pejabat (secara berjenjang) disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung 2. Dokumen perjanjian kinerja Kepala Satuan Kerja yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsung 3. Dokumen perjanjian kinerja pejabat struktural yang disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja 4. Dokumen Penetapan Kinerja yang berasal dari Aplikasi E-Performance
PENGUATAN AKUNTABILITAS								
NO	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)/KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	OUT COME	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DARI RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG/BUKTI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Integritas	Nilai SAKIP	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Jumlah Laporan Monitoring Evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	B03, B06, B09, B12 : 1. Dokumen Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja a. Undangan b. Daftar Hadir c. Notula dan dokumentasi foto d. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja 2. Dokumen Rapat Monev Anggaran
				Laporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Jumlah Laporan Kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM (laporan)	B03	Ka. UPT	Dokumen LKj (laporan kinerja) mengacu kepada format yang ditetapkan KepmenekumHAM M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan laporan kinerja instansi (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
2	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	Meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Jumlah dokumen penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	1. SK TIM SPIP 2. Dokumen Kegiatan Sosialisasi SPIP a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi Foto

								d. Laporan Kegiatan Sosialisasi SPIP 3. Dokumen laporan penerapan inovasi lingkungan pengendalian (sesuai dengan inovasi yang dilakukan dalam pengendalian risiko) 4. Dokumen MR (Manajemen Risiko)
				Telah dilakukan penilaian risiko atau pelaksanaan kebijakan	Jumlah Dokumen manajemen risiko di lingkungan Kementerian Huku dan HAM tingkat unit pemilik risiko unit eselon I, Kanwil dan UPT	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	1. Dokumen Manajemen Risiko sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PermenkumHAM Nomor 5 Tahun 2018 yang disahkan oleh kepala satuan kerja 2. piagam manajemen risiko yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja 3. Dokumen penanganan risiko atas pelayanan publik dari integritas yang memuat penerapan inovasi terkait risiko yang dihadapi satuan kerja
<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>								
NO	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)/ KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	OUT COME	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DARI RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG/ BUKTI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	Meningkatnya responsivitas penyelesaian pengaduan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Memdakanjuti laporan penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR	Jumlah laporan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan dari aplikasi LAPOR  Jumlah Dokumen Implementasi seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi	B03, B06, B09, B12  B03, B06, B09, B12	Ka. UPT  Ka. UPT	<b>B03, B06, B09, B12 :</b>  Laporan penanganan pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala satuan Kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja  <b>B03, B06, B09, B12 :</b> 1. SK Petugas penanganan pengaduan 2. Foto petugas/ ruang/ loket/ kotak khusus pengaduan 3. Capture aplikasi (aplikasi LAPOR, facebook, twitter, instagram, WA, Line) 4. dokumen laporan penanganan pengaduan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan kerja yang berisi informasi pengaduan yang diterima oleh satuan kerja, pengaduan yang sudah ditindaklanjuti satuan kerja, dan pengaduan yang belum ditindaklanjuti satuan kerja
2	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas	Menurunnya tingkat korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan  Hasil Evaluasi atau penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Evaluasi benturan kepentingan  Jumlah Laporan tindak lanjut evaluasi benturan kepentingan	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	<b>B03, B06, B09, B12 :</b>  Laporan Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan  <b>B03, B06, B09, B12 :</b>  Laporan tindak lanjut evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
<b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>								
NO	SASARAN (IMMEDIATE OUTCOME)/ KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	OUT COME	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT DARI RINCIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	DATA DUKUNG/ BUKTI CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Terwujudnya kepatuhan standar pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Jumlah Dokumen upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompeten tentang penerapan budaya pelayanan prima	B03, B06, B09, B12	Ka. UPT	<b>B03 :</b>  1. Dokumen Sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (kegiatan dapat dilakukan oleh internal satuan kerja. Contoh sosialisasi, bimtek, workshop, seminar dan/atau pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik satuan kerja yang dilakukan oleh narasumber eksternal a. Undangan b. Daftar hadir c. Notula dan Dokumentasi Foto d. Laporan Kegiatan peningkatan budaya pelayanan prima 2. Laporan Monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan setelah pelaksanaan sosialisasi <b>B06, B09, B12 :</b>  Laporan Monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan setelah pelaksanaan sosialisasi